



PENETAPAN

Nomor 0216/Pdt.P/2016/PA TI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah, yang diajukan oleh :

Abdul Wahid Jeubun bin Abas Jeubun, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA., pekerjaan PNS, alamat di Danar Sare, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai **Pemohon I**;

Tuti Ngabalin binti Abdul Karim Ngabalin, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Desa Danar Sare, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 14 September 2016 telah mengajukan permohonan itsbat nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 0216/Pdt.P/2016/PA.TI tanggal 20 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 9 Pen. Nomor 0216/Pdt.P/2016/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 November tahun 1995, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Dandar Sare Bapak Moksen Ajamain, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Karim Ngabalin dengan saksi nikah masing-masing bernama Zainudin Renyaan dan Abu Hanifa Let-Let (Alm) dengan maskawin berupa Membaca Ayat Suci Surat AL"IKHLAS Sebanyak 10 (sepuluh) kali dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Dandar Sare dan telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak, masing-masing bernama:
 - 5.1. Nur Aini Yeubun bin Abdul Wahin Yeubun, umur 20 tahun;
 - 5.2. Fitria Yeubun bin Abdul Wahin Yeubun, umur 19 tahun;
 - 5.3. Luxfia Yeubun binti Abdul Wahid Yeubun, umur 18 tahun;
 - 5.4. Farhan Yeubun bin Abdul Wahid Yeubun, umur 13 tahun;
 - 5.5. Abdul Karim Yeubun bin Abdul Wahid Yeubun, umur 6 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari 9 Pen. Nomor 0216/Pdt.P/2016/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdul Wahin Jeubun bin Abas Jeubun) dengan Pemohon II (Tuti Ngabalin binti Abdul Karim Ngabalin) yang dilaksanakan pada tahun 1995 di Desa Dandar Sare, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

SAKSI-SAKSI

1. **Arobu Let-Let bin H. Selamat Let-Let**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, alamat di Desa Dandar Ternate, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah sejak 1995 dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Karim Ngabalin;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi-saksi dalam perkawinan tersebut adalah Zainudin Renyaan dan Abu Hanifa Let-Let (Alm);

Hal 3 dari 9 Pen. Nomor 0216/Pdt.P/2016/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa saksi mengetahui mahar dalam perkawinan tersebut adalah Membaca Ayat Suci Al-Quran Surat Al-Ikhlas Sebanyak 10 (sepuluh) kali;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui telah terjadi ijab qabul dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - ❖ Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui, tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - ❖ Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunai 5 (lima) orang anak;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta nikah;
2. **Zainudin Renyaan bin Moksen Renyaan**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir PGA, pekerjaan Imam Masjid, alamat di Desa Danar Sare, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah sejak 1995 dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Karim Ngabalin;
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi-saksi dalam perkawinan tersebut adalah Zainudin Renyaan dan Abu Hanifa Let-Let (Alm);
 - ❖ Bahwa saksi mengetahui mahar dalam perkawinan tersebut adalah Membaca Ayat Suci Al-Quran Surat Al-Ikhlas Sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Hal 4 dari 9 Pen. Nomor 0216/Pdt.P/2016/PA.TI



- ❖ Bahwa saksi mengetahui telah terjadi ijab qabul dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- ❖ Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui, tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- ❖ Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunai 5 (lima) orang anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya oleh karenanya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya isi dan maksudnya tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (Dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Hal 5 dari 9 Pen. Nomor 0216/Pdt.P/2016/PA.TI



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai dengan angka 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai maksud pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, berdasarkan bukti 2 (Dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sejak tahun 1995 di Desa Danar Sare, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Karim Ngabalin;
3. Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II Abdul Karim Ngabalin, dengan saksi-saksi nikah adalah Zainudin Renyaan dan Abu Hanifa Let-Let (Alm) dan maskawin berupa Membaca Ayat Suci Alquran Surat Al-Ikhlâs Sebanyak 10 (sepuluh) kali dan telah terjadi ijab qabul;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk saling menikah, baik menurut agama maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus akta nikah sebagai bukti tertulis pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat suatu pernikahan sesuai tuntunan agama Islam dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk saling menikah, baik menurut agama maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang sangat kuat (*Mitsaqon ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi hal tersebut harus didukung dengan pencatatan yang secara administratif dari lembaga terkait sehingga ketertiban perkawinan bagi masyarakat dapat terjamin dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Abdul Wahin Jeubun bin Abas Jeubun**) dengan Pemohon II (**Tuti Ngabalin binti Abdul Karim Ngabalin**) yang dilaksanakan pada tahun 1995 di Desa Danar Sare, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;

Hal 7 dari 9 Pen. Nomor 0216/Pdt.P/2016/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami **ADAM MALIK B, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **NENGAH A. NURKHALIS, S.EI.**, dan **OLIS TUNA, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **LA ODE ABDUL RUSMIN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ttd,

NENGAH A. NURKHALIS, S.EI

Hakim Anggota,

Ttd,

OLIS TUNA, S.HI

Ketua Majelis,

Ttd,

ADAM MALIK B, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd,

LA ODE ABDUL RUSMIN, SH

Hal 8 dari 9 Pen. Nomor 0216/Pdt.P/2016/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 100.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 191.000,-
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Tual
Panitera,

Drs. Ali Turki Renhoat

Hal 9 dari 9 Pen. Nomor 0216/Pdt.P/2016/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)